



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 3 Desember 2020

Nomor : 188.3/206.78/SET
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Program Pembentukan Peraturan
Daerah (Propemperda) Provinsi
Papua Tahun 2021.

Kepada
Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua
di –

JAYAPURA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Papua mengajukan Propemperda Provinsi Papua Tahun 2021, untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2021 (daftar Propemperda terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

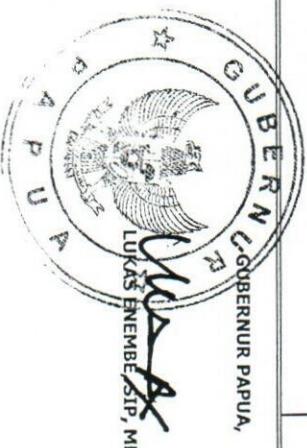
1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRP di Jayapura.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

Lampiran : Surat Gubernur Papua
Nomor : 108-3/20678/SET
Tanggal : 3 Desember 2020

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKASA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	- Pendapatan Daerah. - Belanja Daerah. - Pembinaan Daerah.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
2	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	- Pendapatan Daerah. - Belanja Daerah. - Pembinaan Daerah.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
3	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota.	- Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan - Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi Dengan Kabupaten/Kota - Pengalihan Asset - Penyelegaraan Urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua - Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	RAPERDASI	Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	- Profil Wilayah (Letak Geografis, Administrasi, Kondisi Fisik, Oceanografi dan Gelombang Arus) - Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya. - Kondisi Sosial. - Kondisi Budaya. - Peta dan Ruang Lingkup Perencanaan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
5	Badan KESBANGPOL Provinsi Papua.	RAPERDASU	Pengawasan Sosial.	- Tujuan. - Bentuk Pengawasan. - Tata Cara Pengawasan. - Tindak Lanjut Pengawasan. - Tindak Lanjut Temuan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	2021	
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti.	- Maksud dan Tujuan. - Perubahan Badan Hukum. - Nama dan Tempat Kedudukan. - Bidang Usaha. - Modal. - Saham-saham. - RUPS.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	2021	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMERKASA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK		STATUS	PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1				3	4	5			
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.	RAPERDASI	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	2021
15	BAPPEDA Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021



2021